

Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat (JPDPM)

e-ISSN 2722-4996 p-ISSN 2722-6085

Vol 5 (2) (2024) 61-80

Doi:

Pendampingan Penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan BUMDes Paserhalang Mandiri di Kecamatan Cisarua

Citta Septianty Asyruddin^{1*}, Dewinta Maharani¹, Agnelia Septia Heriyandi¹, Aristanti Widyarningsih¹, Rika Nurriszkiana¹

¹Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Korespondensi: E-mail: citta.septianty@upi.edu

ABSTRAK

Pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paserhalang Mandiri dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan guna mendukung kemandirian ekonomi desa serta program ketahanan pangan. BUMDes ini merupakan unit usaha desa yang baru diaktifkan kembali dan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal perencanaan keuangan yang terstruktur dan transparan. Untuk itu, pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan melalui metode partisipatif yang melibatkan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan validasi data secara kolaboratif bersama pengurus BUMDes. Salah satu luaran utama dari kegiatan ini adalah tersusunnya proyeksi laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Proyeksi tersebut memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi keuangan BUMDes secara lebih akuntabel. Hasilnya menunjukkan potensi usaha yang sehat dengan arus kas positif serta laba bersih yang kompetitif, meskipun masih ditemukan ketidaksesuaian dalam beberapa pos laporan yang membutuhkan validasi lanjutan. Kegiatan pendampingan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperbaiki tata kelola keuangan, serta menyediakan landasan kuat bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes Paserhalang Mandiri diharapkan mampu berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing.

© 2024 Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat

OPEN ACCESS

Article History:

Submitted: 23 Ags 2024

First Revised: 18 Sep 2024

Accepted: 26 Okt 2024

First Available Online: 13 Nov 2024

Publication Date: 28 Nov 2024

Kata Kunci:

Pendampingan,
BUMDes,
Proyeksi laporan keuangan,
Tata Kelola,
Ekonomi desa.

CONTACT: ✉ citta.septianty@upi.edu

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi lokal di pedesaan Indonesia. Dibentuk atas dasar amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes menjadi instrumen kelembagaan yang bertujuan untuk mengelola potensi dan kekayaan desa secara kolektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberadaan BUMDes didesain agar tidak hanya menjadi entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai bentuk implementasi pembangunan berbasis masyarakat, melalui partisipasi aktif dan pengambilan keputusan yang inklusif di tingkat local. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, BUMDes diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak aktivitas produktif di desa dengan memperhatikan aspek tata kelola yang baik dan akuntabel.

Sebagai entitas ekonomi, BUMDes tidak hanya mengelola sumber daya alam dan aset desa, tetapi juga terlibat aktif dalam penciptaan nilai tambah melalui berbagai aktivitas bisnis, termasuk perdagangan, produksi, dan jasa. Peran BUMDes dalam menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha lokal, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi kian penting dalam agenda pembangunan nasional (Tarlani, et al., 2023). Tata kelola yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa BUMDes tidak hanya eksis, tetapi juga tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Proses tata kelola yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa sangat krusial untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

BUMDes Pasirhalang Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan contoh nyata upaya revitalisasi ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan lokal. Setelah mengalami masa vakum operasional selama beberapa tahun, pada tahun ini BUMDes tersebut diaktifkan kembali dengan semangat baru. Komoditas utama yang dikembangkan adalah produksi dan penjualan beras, yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan komersial tetapi juga mendukung program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan yang mengalami defisit gizi, dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menurunkan angka stunting. Kegiatan ini mencerminkan prinsip social enterprise yang menjadi salah satu model pengembangan BUMDes berbasis keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial.

Revitalisasi BUMDes Pasirhalang Mandiri tidak terlepas dari tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek tata kelola keuangan. Dalam praktik sebelumnya, pengelolaan keuangan belum dilandasi oleh prinsip perencanaan yang berbasis data, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif. Pendekatan manajerial lebih banyak bersifat praktis tanpa dukungan teori dan sistem pelaporan yang baku, sehingga menyulitkan proses akuntabilitas dan pengambilan keputusan strategis (Marlinda & Sudarma, 2023; Ratmasari, Yuliani, & Purwantini, 2021). Kelemahan ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap

BUMDes dan terbatasnya kemampuan lembaga untuk memperluas jangkauan usahanya secara optimal.

Sebagai respon terhadap kebutuhan penguatan tata kelola, dilakukan kegiatan pendampingan yang berfokus pada penyusunan analisis proyeksi laporan keuangan. Tujuan utama dari intervensi ini adalah menyediakan kerangka kerja yang sistematis dalam perencanaan keuangan, sekaligus meningkatkan kapasitas pengurus dalam memahami dan menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Proyeksi laporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko yang dapat membantu pengelola mengenali potensi kerugian serta peluang pengembangan usaha.

Pendampingan dilakukan dengan metode partisipatif, di mana para pengurus dilibatkan langsung dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan asumsi dasar, hingga penyusunan laporan proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Metode ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran aktif dan peningkatan pemahaman terhadap manajemen keuangan yang terstruktur. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya pengelolaan usaha berbasis data dan perencanaan strategis yang realistis. Keberadaan proyeksi keuangan juga mempermudah komunikasi antara pengelola BUMDes dengan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah desa dan lembaga pendamping, dalam rangka memperoleh dukungan pembiayaan maupun kemitraan usaha.

Keberhasilan tata kelola BUMDes sangat ditentukan oleh implementasi enam prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kooperatif, emansipatif, dan keberlanjutan. Setiap indikator tersebut saling terkait dan memiliki pengaruh langsung terhadap performa organisasi, baik dari sisi keuangan maupun sosial. Oleh karena itu, pembenahan aspek tata kelola harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten, agar mampu menghasilkan dampak positif yang nyata terhadap kinerja BUMDes. Model tata kelola partisipatif menjadi sangat penting karena menjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pembangunan desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek.

Tata kelola yang baik tidak hanya menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha, tetapi juga menjadi faktor penentu keberlanjutan kelembagaan. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan misinya sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara tujuan komersial dan misi sosial. Ketika BUMDes berhasil mencetak keuntungan, laba tersebut seyogyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk memperkuat struktur modal, tetapi juga didistribusikan dalam bentuk layanan atau bantuan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks inilah, integrasi antara tata kelola keuangan dan strategi sosial menjadi kunci untuk menciptakan BUMDes yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui analisis proyeksi keuangan yang disusun selama kegiatan pendampingan, diharapkan pengelola BUMDes Pasirhalang Mandiri memperoleh panduan praktis yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, perencanaan

usaha, dan penentuan prioritas pengembangan. Selain itu, data proyeksi juga memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan masa depan yang memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko yang mungkin muncul, seperti fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan pada pasar lokal, atau inefisiensi operasional (Harto & Riwandari, 2018). Hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan sebagai basis formulasi kebijakan internal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kredibilitas BUMDes di mata mitra dan investor potensial (Priatna, Hakim, Syaikat, & Effendi, 2023).

Secara keseluruhan, penguatan tata kelola keuangan melalui penyusunan proyeksi laporan keuangan merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes secara signifikan. Praktik ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam menjalankan usaha yang berbasis pada potensi lokal. Ke depan, diharapkan pendekatan serupa dapat direplikasi oleh BUMDes lain di berbagai wilayah, sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi desa yang tangguh dan mandiri (Hakam et al., 2023).

METODE

Kegiatan pendampingan dalam program penguatan tata kelola keuangan BUMDes Pasirhalang Mandiri dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik masalah yang dihadapi, yaitu perlunya pemahaman mendalam terhadap dinamika internal BUMDes dan perlunya kolaborasi aktif antara tim pendamping dan pengurus BUMDes dalam proses perumusan solusi. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap latar belakang masalah secara kontekstual, sedangkan pendekatan partisipatif menjamin keterlibatan langsung para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga hasil yang diperoleh bersifat aplikatif dan diterima oleh semua pihak yang terlibat (Wibowo & Hapsari, 2022; Hapsari, et al., 2020).

Tahapan kegiatan dimulai dengan observasi awal dan pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui penelusuran dokumen administratif BUMDes, seperti struktur organisasi, laporan keuangan sebelumnya (jika tersedia), catatan transaksi harian, serta rencana kegiatan usaha yang sedang dan akan dijalankan. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai kondisi kelembagaan dan manajerial BUMDes. Informasi awal ini menjadi dasar penyusunan instrumen untuk wawancara dan diskusi lebih lanjut. Pendekatan sistematis ini bertujuan agar kegiatan pendampingan tidak bersifat intervensif semata, tetapi berakar pada realitas objektif yang sedang dihadapi BUMDes.

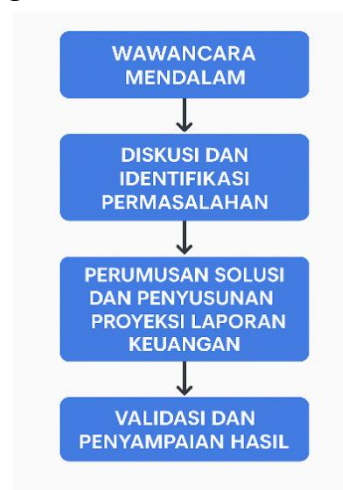
Tahap kedua adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilaksanakan pada minggu pertama kegiatan. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pengurus inti BUMDes, termasuk Ketua, Bendahara, dan Pengelola Unit Usaha. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara holistik terkait profil kelembagaan BUMDes Pasirhalang Mandiri, jenis usaha yang dijalankan, alur distribusi hasil usaha, serta sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlaku. Pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka dan fleksibel,

untuk memungkinkan responden menjelaskan situasi secara naratif. Melalui pendekatan ini, diperoleh pemahaman mendalam mengenai hambatan aktual yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan.

Setelah informasi dasar terkumpul, pada minggu kedua dilakukan forum diskusi partisipatif yang melibatkan seluruh pengurus BUMDes dan tim pendamping. Diskusi ini difokuskan pada identifikasi akar permasalahan dalam aspek tata kelola keuangan serta eksplorasi kebutuhan strategis yang diperlukan oleh pengurus untuk memperbaiki sistem keuangan secara menyeluruh. Teknik diskusi dilakukan dengan metode *problem tree analysis*, untuk membantu memetakan penyebab utama dan dampak dari permasalahan yang ada, seperti tidak adanya proyeksi keuangan, lemahnya pencatatan transaksi, serta belum optimalnya peran bendahara dalam menyusun laporan. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dirumuskan bersifat kontekstual dan sesuai dengan kapasitas kelembagaan yang ada.

Tahap terakhir adalah validasi dokumen proyeksi keuangan yang dilakukan melalui forum diskusi lanjutan bersama seluruh pengurus BUMDes. Kegiatan ini difasilitasi dengan pendekatan reflektif dan dialogis, di mana setiap bagian dari proyeksi dijelaskan secara rinci untuk memperoleh masukan, klarifikasi, atau penyesuaian terhadap kondisi aktual yang mungkin belum tercermin dalam dokumen awal. Validasi ini bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan manajerial oleh pengurus BUMDes. Selain itu, tahap ini juga membangun rasa memiliki terhadap dokumen proyeksi yang akan digunakan sebagai alat kontrol dan evaluasi keuangan secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan metode kualitatif-deskriptif dengan tahapan yang partisipatif, kegiatan pendampingan ini tidak hanya menghasilkan produk dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes Pasirhalang Mandiri secara jangka panjang.



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mata kuliah Proyek Konsultansi dilaksanakan selama periode April hingga Mei 2025, dengan total empat kali pertemuan lapangan yang masing-masing dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) yang mengintegrasikan analisis empiris, pendekatan konsultatif, dan kolaborasi multipihak antara mahasiswa, dosen, pemerintah desa, serta *stakeholder* lainnya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes, serta menyusun rekomendasi yang bersifat praktis dan strategis dalam rangka memperkuat tata kelola, khususnya di aspek keuangan dan perencanaan usaha..

Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 25 April 2025, yang diawali dengan agenda koordinasi awal antara tim dosen pengampu mata kuliah dan pihak Kecamatan Cisarua. Kegiatan koordinasi ini dilakukan sebagai upaya membangun sinergi institusional dan sebagai bentuk etika profesional untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim pelaksana. Dalam forum ini, dijelaskan bahwa kegiatan mahasiswa bukan sekadar observasi lapangan, melainkan bagian dari tugas akademik yang berorientasi pada pendampingan dan pemberian masukan berbasis analisis terhadap operasional BUMDes. Koordinasi berjalan dengan lancar dan penuh apresiasi dari pihak kecamatan, yang kemudian mengarahkan kami ke lokasi desa sasaran, yaitu Desa Pasirhalang.

Sesampainya di Desa Pasirhalang, kami memulai tahapan pengenalan lapangan melalui observasi awal terhadap kondisi fisik dan administratif desa. Observasi ini mencakup peninjauan terhadap kantor desa, papan informasi publik, serta lokasi usaha BUMDes yang sedang dijalankan. Observasi tersebut memberikan gambaran umum mengenai tingkat visibilitas dan aksesibilitas informasi publik yang tersedia di lingkungan desa. Langkah ini penting untuk menyusun kerangka awal pemetaan masalah. Dalam waktu yang sama, kami juga mulai menjalin komunikasi dengan aparatur desa sebagai bentuk pendekatan awal terhadap pihak internal pemerintahan desa. Kontak utama yang kami temui adalah Bapak Soleh selaku Kepala Desa Pasirhalang, yang menyambut kehadiran kami dengan baik serta menyatakan dukungan terhadap kegiatan proyek konsultansi yang akan dilaksanakan.

Namun, pada saat kunjungan pertama tersebut, kegiatan internal BUMDes sedang berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi tertutup. Oleh karena itu, kesempatan untuk melakukan diskusi mendalam dengan pengurus BUMDes belum dapat dilakukan. Kendati demikian, kami tetap berhasil memperoleh kontak person pengurus BUMDes, yang kemudian dijadikan sebagai pintu masuk utama untuk melakukan penjadwalan pertemuan lanjutan secara lebih intensif. Informasi awal yang diperoleh dari kepala desa serta dokumen yang tersedia di kantor desa menjadi dasar untuk mempersiapkan instrumen wawancara dan diskusi yang lebih terarah pada pertemuan berikutnya.

Selain aspek administratif dan komunikasi awal, pertemuan pertama ini juga digunakan sebagai sarana refleksi dan evaluasi awal oleh tim mahasiswa dan dosen pembimbing mengenai kondisi faktual di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan BUMDes telah diaktifkan kembali, masih terdapat beberapa tantangan seperti minimnya dokumentasi keuangan yang terdigitalisasi serta belum adanya rencana usaha jangka menengah yang terdokumentasi secara sistematis. Temuan awal ini memperkuat pentingnya kehadiran kegiatan konsultasi akademik yang tidak hanya bersifat analisis, tetapi juga mampu memberikan *capacity building* secara langsung kepada pengurus BUMDes (Widiastuti, Putra, Utami, & Suryanto, 2019; Mudhofar, 2022).

Dengan demikian, pertemuan pertama ini memainkan peran penting sebagai landasan awal dalam membangun relasi, mengidentifikasi konteks permasalahan, dan merancang pendekatan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tahap ini juga merefleksikan pentingnya komunikasi lintas institusi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi program akademik berbasis pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Kunjungan Pertama ke Kantor Kecamatan Cisarua

Pertemuan kedua dalam rangkaian kegiatan Proyek Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 dan difokuskan pada tahap awal pengumpulan informasi mendalam mengenai kondisi aktual dan aktivitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasirhalang. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menggali pemahaman menyeluruh terkait latar belakang pendirian kembali BUMDes, struktur kelembagaan yang berlaku, arah kebijakan usaha, serta rencana strategis yang sedang disusun oleh pihak pengelola. Kegiatan dilaksanakan melalui metode wawancara terstruktur yang melibatkan jajaran pengurus inti BUMDes dan difasilitasi oleh perangkat desa guna memastikan kelancaran dan kredibilitas proses pengumpulan data.

Wawancara dilakukan dalam suasana formal namun terbuka, yang memungkinkan dialog dua arah berlangsung dengan intensitas tinggi. Dalam wawancara tersebut, pihak pengurus BUMDes menjelaskan bahwa lembaga ini sempat mengalami vakum operasional selama beberapa tahun terakhir akibat berbagai kendala, seperti pergantian kepemimpinan desa, ketidakpastian arah usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang manajerial. Aktivasi kembali BUMDes Pasirhalang baru dilakukan pada awal tahun 2025, seiring dengan

komitmen Kepala Desa untuk menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari segi kelembagaan, BUMDes saat ini dikelola oleh tim pengurus baru yang dilantik secara resmi pada saat pertemuan berlangsung. Pengesahan ini merupakan langkah awal menuju pembenahan struktural BUMDes agar memiliki legitimasi hukum dan administratif yang lebih kuat. Struktur organisasi yang terbentuk masih bersifat sederhana, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, tanpa divisi-divisi operasional yang spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan BUMDes masih berada dalam fase awal rekonstruksi dan belum mencapai tingkat kematangan institusional yang optimal (Sawitri et al., 2020; Sinarwati & Prayudi, 2021).

Dalam diskusi terungkap bahwa arah dan konsep pengembangan usaha BUMDes belum diformulasikan secara rinci. Para pengurus baru sedang dalam tahap eksplorasi potensi lokal desa serta penyusunan rencana strategis usaha yang mencakup pemilihan unit bisnis yang sesuai dengan karakteristik ekonomi masyarakat setempat. Meskipun telah ditentukan bahwa komoditas utama yang akan dikembangkan adalah beras, belum tersedia kerangka model bisnis yang terperinci, termasuk aspek pemasaran, rantai distribusi, harga pokok produksi, maupun proyeksi pendapatan. Hal ini mencerminkan bahwa BUMDes masih membutuhkan pendampingan dalam menyusun perencanaan usaha berbasis data dan analisis pasar.

Di sisi lain, aspek manajemen keuangan juga belum mendapatkan perhatian yang memadai. Belum terdapat sistem pencatatan yang terdokumentasi secara sistematis, baik dalam bentuk manual maupun digital. Laporan keuangan terdahulu pun tidak tersedia sebagai referensi karena masa vakum operasional sebelumnya tidak disertai dengan proses pelaporan yang memadai. Kondisi ini menjadi salah satu fokus penting bagi kegiatan konsultasi ke depan, khususnya dalam hal penyusunan sistem keuangan yang sederhana, akuntabel, dan mudah dioperasikan oleh pengelola dengan latar belakang non-akuntansi.

Momen pertemuan kedua ini juga memberikan gambaran awal mengenai kesiapan mental dan motivasi dari pengurus baru BUMDes. Meskipun sebagian besar pengurus memiliki pengalaman terbatas dalam bidang kewirausahaan dan tata kelola lembaga ekonomi, terdapat semangat kuat untuk belajar dan membuka diri terhadap inovasi. Hal ini menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan kegiatan pendampingan selanjutnya. Tim pengabdian mencatat bahwa proses transformasi kelembagaan BUMDes Pasirhalang tidak hanya memerlukan intervensi teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan pendampingan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh (Zulaifah & Marwata, 2020).

Secara keseluruhan, pertemuan kedua ini menjadi titik awal pembentukan pemahaman bersama antara tim pendamping dan pengurus BUMDes terkait kondisi riil kelembagaan, tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan. Informasi yang diperoleh pada tahap ini menjadi fondasi penting untuk merancang strategi intervensi yang relevan, terukur, dan sesuai dengan kapasitas lokal yang ada. Dengan dasar ini pula, tim menyusun agenda untuk pertemuan ketiga yang akan difokuskan

pada identifikasi permasalahan secara lebih spesifik melalui pendekatan partisipatif dan penyusunan alternatif solusi awal.



Gambar 3. *Kunjungan Kedua Ke Rumah Direktur BUMDes*

Pertemuan ketiga dalam rangkaian kegiatan pendampingan BUMDes Pasirhalang difokuskan pada pendalaman isu teknis yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dan perencanaan anggaran usaha desa. Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk diskusi terbuka antara pengurus BUMDes, perwakilan pemerintah desa, dan tim pendamping. Diskusi ini menjadi titik awal penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dalam menyusun perencanaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip efisiensi sumber daya.

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan dokumen Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) yang telah disusun oleh pengurus sebagai panduan awal pelaksanaan program kerja. RAB tersebut berisi rincian estimasi biaya untuk berbagai kegiatan, termasuk pembelian bahan baku, alat produksi, biaya operasional, serta dukungan terhadap program sosial seperti penyediaan pangan bergizi untuk warga kurang mampu. Dalam telaah awal, dokumen ini terlihat cukup lengkap dari sisi struktur, namun ketika ditinjau lebih mendalam, ditemukan sejumlah kejanggalan pada beberapa item anggaran yang mencerminkan potensi masalah dalam proses penyusunan dan validasinya (Risnawati et al., 2022).

Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara nilai-nilai nominal yang tercantum dalam RAB dengan harga pasar yang berlaku. Beberapa pos pengeluaran menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari standar harga umum, tanpa disertai dengan referensi atau justifikasi yang memadai. Ketidaktepatan dalam estimasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya pemahaman pengurus terhadap mekanisme pembentukan anggaran yang berbasis data. Selain itu, ada pula item yang tampak dianggarkan secara berlebihan untuk kegiatan non-prioritas, sementara kegiatan inti seperti operasionalisasi produksi beras tidak mendapatkan alokasi yang proporsional. Hal ini menunjukkan belum adanya prioritas strategis dalam penyusunan rencana keuangan.

Diskusi berkembang dengan munculnya pertanyaan dari pihak desa dan tim pendamping terkait dasar perhitungan yang digunakan, metode pengumpulan data

harga, serta proses internal yang dilalui sebelum dokumen ini dirumuskan. Ketika ditelusuri, ternyata penyusunan RAB masih bersifat *top-down* dan belum melibatkan analisis kebutuhan secara menyeluruh. Proses penyusunan juga belum melewati tahapan validasi bersama stakeholder, sehingga dokumen anggaran yang dihasilkan belum mencerminkan aspirasi bersama dan realitas ekonomi local. Kurangnya pelibatan partisipatif ini juga menimbulkan keraguan terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan BUMDes secara keseluruhan.

Masalah efisiensi dan akuntabilitas menjadi dua topik utama dalam diskusi lanjutan. Beberapa peserta forum menyampaikan kekhawatiran bahwa jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka BUMDes akan rentan terhadap penyalahgunaan anggaran, pengeluaran tidak efektif, serta gagal mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, muncul usulan untuk merevisi RAB secara menyeluruh dengan melibatkan tim teknis pendamping yang memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan anggaran dan keuangan mikro. Usulan ini diterima secara terbuka oleh pengurus BUMDes yang juga menyadari keterbatasan kapasitas mereka dalam menyusun perencanaan berbasis data.

Tim pendamping menawarkan pendekatan penyusunan ulang RAB yang mengacu pada prinsip *needs-based budgeting* dan *cost benchmarking*, yaitu dengan melakukan survei harga pasar aktual, mengidentifikasi kebutuhan riil operasional, dan menyusun skenario perencanaan keuangan yang realistis. Proses ini akan mencakup penyusunan format RAB baru yang lebih terstruktur, pengklasifikasian prioritas pengeluaran, serta penyesuaian alokasi dana untuk mendukung kegiatan produktif secara optimal. Tidak hanya itu, disepakati pula perlunya pelatihan teknis singkat bagi pengurus mengenai penyusunan anggaran berbasis data dan transparansi fiskal desa (Hakam, 2023).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam organisasi desa. Tata kelola yang akuntabel bukan hanya soal penyusunan dokumen administrasi, tetapi juga menyangkut kemampuan merancang anggaran yang mencerminkan keadilan, efisiensi, dan akurasi. Dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa perbaikan dalam perencanaan keuangan adalah langkah awal yang strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan usaha desa yang sehat dan berkelanjutan.



Gambar 4. *Kunjungan Kedua Ke Rumah Direktur BUMDes*

Pertemuan keempat menjadi tahapan penutup dari seluruh rangkaian kegiatan konsultasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan terakhir di Desa Pasirhalang. Kegiatan ini dirancang sebagai forum evaluatif untuk merefleksikan proses yang telah dilalui serta mengkaji efektivitas pendekatan yang digunakan dalam mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasirhalang Mandiri. Pertemuan ini berlangsung di kantor desa dengan dihadiri oleh unsur pimpinan desa, yakni Kepala Desa, sekretaris BUMDes, serta pendamping desa yang selama ini menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menandai komitmen kuat dari pihak desa terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BUMDes secara menyeluruh.

Dalam forum ini, dilakukan pemaparan hasil observasi, diskusi, dan analisis yang telah dihimpun dari tiga pertemuan sebelumnya. Pemaparan ini mencakup identifikasi permasalahan dalam perencanaan anggaran, lemahnya sistem pencatatan keuangan, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) untuk kegiatan usaha, serta minimnya strategi jangka panjang dalam pengembangan unit bisnis desa. Tim pendamping menjelaskan bahwa sebagian besar hambatan yang dihadapi BUMDes Pasirhalang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersumber dari kelemahan sistemik, seperti kurangnya pelatihan, belum optimalnya koordinasi antar perangkat desa, serta belum tersusunnya dokumen perencanaan bisnis yang berbasis data dan proyeksi keuangan yang kredibel (Putra et al., 2020; Mutiarni et al., 2018).

Diskusi berjalan konstruktif, di mana pihak pengurus BUMDes menyampaikan respon positif terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan. Mereka mengakui bahwa pengalaman selama proses pendampingan memberikan wawasan baru mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta pendekatan berbasis analisis dalam menjalankan organisasi usaha desa. Beberapa pengurus bahkan menyampaikan niat untuk segera merevisi dokumen RAB dan menyusun ulang proyeksi keuangan jangka pendek serta jangka menengah sesuai dengan standar yang telah diberikan. Komitmen ini menjadi indikator bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang profesional dalam mengelola sumber daya ekonomi desa (Iriani et al., 2020).

Selain evaluasi terhadap proses pendampingan, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk membangun visi kolaborasi jangka panjang antara pemerintah desa dan institusi pendidikan tinggi. Pihak desa, yang diwakili oleh Kepala Desa, menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa dapat terus berlanjut di masa depan. Mereka menilai bahwa sinergi antara desa dan universitas memiliki potensi besar dalam mempercepat penguatan kapasitas lokal, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan kelembagaan. Secara khusus, Kepala Desa menyampaikan apresiasi kepada program studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia atas kontribusinya dalam memberikan solusi nyata terhadap permasalahan desa.

Sebagai bentuk tindak lanjut, kedua belah pihak menyepakati pentingnya merancang kerangka kerja sama berkelanjutan yang memungkinkan pertukaran keahlian secara rutin, baik melalui program magang mahasiswa, kegiatan penelitian terapan, maupun pelatihan dan penyuluhan yang berbasis kebutuhan desa. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian masyarakat tidak dipahami sekadar sebagai kewajiban akademik, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) yang mengutamakan keberdayaan lokal.

Pertemuan ini diakhiri dengan penyampaian harapan agar hasil dari rangkaian kegiatan ini dapat menjadi pijakan awal dalam membangun sistem pengelolaan BUMDes yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data. Dalam jangka panjang, kerja sama antara desa dan universitas diharapkan tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya praktik tata kelola usaha yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi kemandirian ekonomi desa.



Gambar 5. Kunjungan terakhir Ke Kantor Desa Pasirhalang

Dalam rangka memperkuat kapasitas analitis dan teknis mahasiswa dalam kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasirhalang Mandiri, tim dosen pengampu mata kuliah Proyek Konsultansi memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai tiga komponen utama dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, yakni proyeksi arus kas (*cash flow projection*), proyeksi neraca (*balance sheet projection*), dan proyeksi laporan laba rugi (*income statement projection*). Penjelasan ini diberikan tidak sekadar sebagai transfer pengetahuan teoritis, tetapi sebagai bagian dari strategi pembelajaran kontekstual untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman aplikatif dalam menyusun dokumen keuangan yang realistis, sistematis, dan berbasis data aktual. Di era otonomi desa, keterampilan teknis semacam ini menjadi krusial karena keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh semangat kewirausahaan, tetapi juga oleh kemampuan dalam merancang dan mengelola keuangan usaha secara profesional dan transparan (Rahmawati et al., 2023).

Dalam proses pembelajaran tersebut, dijelaskan bahwa proyeksi laporan keuangan bukanlah sekadar prediksi angka-angka finansial masa depan, melainkan merupakan instrumen strategis untuk mengidentifikasi arah usaha, mengukur

potensi kinerja masa depan, dan merancang skenario mitigasi risiko keuangan yang dapat muncul akibat fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, kemampuan menyusun proyeksi keuangan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan manajerial yang informatif dan akuntabel, khususnya dalam konteks usaha desa yang sedang berkembang. Dalam kerangka ini, peran mahasiswa tidak hanya sebagai pendamping teknis, melainkan sebagai agen transformasi pengetahuan yang dapat membantu pengurus BUMDes dalam memahami logika keuangan dan membuat keputusan berbasis bukti.

Penjelasan pertama difokuskan pada penyusunan proyeksi laporan laba rugi, yang bertujuan untuk memperkirakan potensi pendapatan dan beban usaha dalam suatu periode tertentu. Dosen menjelaskan secara rinci bagaimana mengestimasi pendapatan dari unit usaha utama BUMDes, seperti penjualan beras, serta bagaimana mengklasifikasikan dan menganalisis berbagai jenis beban operasional, termasuk biaya produksi, biaya distribusi, biaya administrasi, dan beban lainnya. Pemahaman atas elemen-elemen ini menjadi dasar penting untuk mengukur apakah usaha yang dijalankan akan menghasilkan laba atau justru menimbulkan kerugian dalam jangka pendek dan menengah. Selain itu, kami juga diperkenalkan pada konsep margin laba kotor dan laba bersih, yang menjadi indikator efisiensi operasional dan rentabilitas usaha. Dalam konteks BUMDes, laba bersih bukan semata keuntungan komersial, melainkan juga sumber pembiayaan program sosial desa yang inklusif.

Selanjutnya, mahasiswa dipaparkan pada penyusunan proyeksi neraca, yang menggambarkan posisi keuangan BUMDes pada akhir periode dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Pengetahuan tentang proyeksi neraca menjadi penting karena dari sinilah dapat dianalisis struktur permodalan, tingkat likuiditas, dan keberlanjutan keuangan jangka panjang BUMDes. Dosen menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek agar likuiditas tetap terjaga dan usaha tidak terganggu oleh masalah arus kas. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana mencatat nilai persediaan bahan baku, piutang pelanggan, aset tetap seperti mesin penggiling beras, serta bagaimana mencerminkan sumber pembiayaan dalam ekuitas. Proyeksi neraca ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi struktur keuangan BUMDes secara periodik. Dari sini, mahasiswa memahami bahwa neraca bukan hanya sekumpulan data statis, tetapi cerminan dari strategi usaha yang dinamis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Komponen terakhir yang dijelaskan adalah proyeksi arus kas, yang dianggap sebagai komponen paling vital dalam menjaga kelangsungan operasional usaha sehari-hari. Melalui penjelasan dosen, mahasiswa diajak memahami bagaimana arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan disusun dan dipantau secara berkala. Dengan menggunakan simulasi data sederhana, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana prediksi arus kas positif memberikan ruang untuk ekspansi usaha, sedangkan arus kas negatif menandakan perlunya pengendalian pengeluaran dan kebijakan efisiensi. Pemahaman ini menjadi krusial karena banyak BUMDes gagal berkembang bukan karena tidak memiliki potensi usaha, melainkan karena lemahnya manajemen kas dan pengambilan keputusan pembiayaan yang tidak berdasarkan proyeksi arus kas yang realistis.

Ketiga jenis proyeksi ini — laporan laba rugi, neraca, dan arus kas — disusun secara terintegrasi, di mana perubahan dalam satu komponen akan memengaruhi dua komponen lainnya. Mahasiswa diajarkan bahwa proyeksi yang terintegrasi memberikan gambaran yang lebih utuh dan kredibel tentang kondisi finansial BUMDes, sehingga mampu menjadi dasar argumentatif dalam penyusunan strategi usaha dan pengajuan pendanaan ke lembaga keuangan mitra atau pemerintah daerah. Melalui pendekatan partisipatif dalam kelas maupun dalam kegiatan pendampingan langsung di lapangan, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung yang memperkuat kemampuan berpikir sistematis, kritis, dan berbasis data. Pengetahuan yang diperoleh ini menjadi bekal penting dalam membantu pengurus BUMDes menyusun dokumen proyeksi keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis jangka Panjang.

Dengan demikian, kegiatan penjelasan teknis mengenai penyusunan proyeksi laporan keuangan bukan hanya berkontribusi pada pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes Pasirhalang Mandiri. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi antara pembelajaran akademik dan praktik sosial-ekonomi di tingkat desa dapat menjadi model pendidikan tinggi berbasis pemberdayaan/ Penyusunan proyeksi keuangan yang akurat dan berbasis data menjadi fondasi dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha desa. Dengan dukungan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan pengurus BUMDes dapat terus mengembangkan kapasitasnya dan menjadikan laporan keuangan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan usaha yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa.

PROYEKSI ARUS KAS														
E. PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2025														
NO		TAHUN 1												JML TAHUN 1
		BULAN KE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	SALDO KAS AWAL	-	52.363.286	45.779.714	38.810.429	35.055.429	119.457.571	88.988.286	80.304.714	72.335.429	155.237.571	124.768.286	116.084.714	0
	PENERIMAAN													
A	PENDANAAN/PEMBIAYAAN													
1	Penyerahan Modal Desa	226.204.000												226.204.000
2	Penyerahan Modal Masyarakat													-
	Jumlah Penyerahan Modal	226.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.204.000
B	PENDAPATAN USAHA													
1	beras	-	13.000.000			96.571.429	-	-	-	96.571.429	-	-	-	206.142.857
2	dedak	-	1.000.000			3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	7.000.000
	Jumlah penjualan	-	14.000.000	-	-	99.571.429	-	-	-	99.571.429	-	-	-	213.142.857
C	PENERIMAAN LAIN-LAIN													-
1	Bunga Bank													-
	Jumlah penerimaan Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C)	226.204.000	14.000.000	-	-	99.571.429	-	-	-	99.571.429	-	-	-	439.346.857
	PENGELUARAN													
D	PENGELUARAN INVESTASI													
1	sewa bangunan lumbung	5.000.000		-										5.000.000
2	Kandang Kerbau	7.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
3	sewa lahan penanaman	34.000.000												34.000.000
4	Manajemen Bumdes	4.000.000												4.000.000
5	Laporan Keuangan Bumdes	4.000.000												4.000.000
6	Manajemen Tani	4.000.000												4.000.000
7	Gabah kering giling	6.500.000												6.500.000
12														-
	Jumlah Sewa Dibayar Dimuka	64.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500.000
E	PENGELUARAN INVESTASI													-
	PEMBELIAN PERALATAN DAN MESIN:													-
1	Kerbau	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	Mesin giling beras	40.000.000												40.000.000
3	Mesin ayak beras	8.500.000												8.500.000
4	Spray	2.000.000												2.000.000
5	mesin jahit karung	2.000.000												2.000.000
6	timbangan	2.000.000												2.000.000
7	Karung gabah 50 kg	1.142.857												1.142.857
8	terpal 6x8	2.500.000												2.500.000
13														-
	Jumlah Pembelian Peralatan	88.142.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.142.857
F	PENGELUARAN MODAL KERJA:													
1	Benih Padi	2.357.143				2.357.143				2.357.143				7.071.429
2	Urea		3.214.286				3.214.286				3.214.286			9.642.857
3	NPK/PONSKA		2.571.429				2.571.429				2.571.429			7.714.286
4	SCORE		2.428.571				2.428.571				2.428.571			7.285.714
5	ANTRAKOL		1.214.286				1.214.286				1.214.286			3.642.857
6	JARING					1.571.429				1.571.429				3.142.857
7	karung beras 10 kg		2.971.429			2.971.429				2.971.429				8.914.286
15		-												-
	Jumlah Pengeluaran Modal Kerja	2.357.143	12.400.000	-	-	6.900.000	9.428.571	-	-	6.900.000	9.428.571	-	-	47.414.286
G	PENGELUARAN OPERASIONAL													-
1	Pematangan Lahan	1.428.571					1.428.571				1.428.571			4.285.714
2	Cangkul Lahan	7.714.286					7.714.286				7.714.286			23.142.857
3	Panen	3.214.286					3.214.286				3.214.286			9.642.857
4	Tandur	6.428.571					6.428.571				6.428.571			19.285.714
5	Biaya Rambat		3.214.286	3.214.286				3.214.286	3.214.286			3.214.286	3.214.286	19.285.714
6	Biaya Angkut		714.286					714.286				714.286		2.142.857
7	Biaya Air	2.500.000	2.500.000					2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000	15.000.000
8	Pemeliharaan Kerbau	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.200.000
9	Biaya angkut gabah				1.500.000					1.500.000				3.000.000
10	HOK giling	500.000				5.714.286				5.714.286				11.928.571
11	bmn					300.000				300.000				600.000
12														-
	Jumlah Biaya Oprasional	18.785.714	8.128.571	6.914.286	2.700.000	7.214.286	19.985.714	7.628.571	6.914.286	8.714.286	19.985.714	7.628.571	6.914.286	121.514.286
H	HONORARIUM dll													-
1	Beban Gaji Pengurus	-			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000
2	Beban Perlengkapan (ATK)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
3	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Istrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Administrasi dan Umum Lainnya	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
														-
	Jumlah Biaya Kantor (Pusat)	40.000	40.000	40.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	9.480.000
	LAIN LAIN													-
1	Pajak Bunga Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrasi Bank	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	Jumlah pengeluaran lain-lain	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	JUMLAH PENGELUARAN (D+E+F+G+H)	173.840.714	20.583.571	6.969.286	3.755.000	15.169.286	30.469.286	8.683.571	7.969.286	16.669.286	30.469.286	8.683.571	7.969.286	331.231.429
M	SELISIH (Penerimaan - Pengeluaran)	52.363.286	(6.583.571)	(6.969.286)	(3.755.000)	84.402.143	(30.469.286)	(8.683.571)	(7.969.286)	82.902.143	(30.469.286)	(8.683.571)	(7.969.286)	108.115.429
N	KAS AKHIR	52.363.286	45.779.714	38.810.429	35.055.429	119.457.571	88.988.286	80.304.714	72.335.429	155.237.571	124.768.286	116.084.714	108.115.429	

Gambar 6. Proyeksi Arus Kas

Penyusunan proyeksi laporan keuangan BUMDes Pasirhalang Mandiri dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan yang akan dihadapi selama satu tahun operasional. Berdasarkan hasil pendampingan, proyeksi arus kas menunjukkan bahwa total penerimaan yang diperkirakan mencapai Rp425.346.857. Angka ini terutama berasal dari penyerahan modal desa sebesar Rp226.204.000, serta pendapatan usaha yang bersumber dari penjualan beras dan dedak senilai Rp199.142.857. Di sisi lain, total pengeluaran diperkirakan mencapai Rp266.231.429, yang mencakup belanja investasi, modal kerja, biaya operasional, serta honorarium dan administrasi. Dengan demikian, BUMDes diproyeksikan

memperoleh arus kas bersih sebesar Rp159.115.429, yang mencerminkan kondisi keuangan yang likuid dan sehat.

D. PROYEKSI NERACA 2025							
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027			
1	2	3	4				
1	ASET				Total Aset	:	Rp 261.470.667
2	Aset Lancar				Total Ekuitas	:	Rp 260.404.952
3	Kas	Rp 108.115.429	Rp -	Rp -	Laba Bersih Tahun Berjalan	:	Rp 41.712.381
4	Kas (Proyeksi Laba)	Rp 41.712.381			Capital Expenditure	:	Rp 600.000
5	Setara Kas	Rp -	Rp -		Kontribusi terhadap PADes	:	Rp 12.513.714
6	Piutang	Rp -	Rp -				
7	Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -				
8	Persediaan	Rp -	Rp -				
9	Perlengkapan	Rp -	Rp -				
10	Pembayaran Dimuka	Rp -	Rp -	Rp -			
11	Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -				
12	RK Unit Usaha	Rp -	Rp -				
13	Total Aset Lancar	Rp 149.827.810	Rp -	Rp -			
14							
15	Investasi						
16	Investasi	Rp 226.204.000	Rp -				
17	Total Investasi	Rp 226.204.000	Rp -				
18							
19	Aset Tetap						
20	Tanah	Rp -	Rp -				
21	Kendaraan	Rp -	Rp -				
22	Peralatan dan Mesin	Rp 27.200.000	Rp (38.742.857)	Rp (38.742.857)			
23	Meubelair	Rp -	Rp -				
24	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -				
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -				
26	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 65.942.857	Rp 131.885.714	Rp 197.828.571			
27	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -				
28	Total Aset Tetap	Rp 93.142.857	Rp 93.142.857	Rp 159.085.714			
29							
30	Aset Takberwujud						
31	Aset Takberwujud	Rp 18.500.000	Rp -				
32	Amortisasi Aset Takberwujud	Rp -	Rp -				
33	Total Aset Takberwujud	Rp 18.500.000	Rp -				
34							
35	Aset Lain-lain						
36	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -				
37	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp -	Rp -				
38	Total Aset Lain-lain	Rp -	Rp -				
39	TOTAL ASET	Rp 261.470.667	Rp 93.142.857	Rp 159.085.714			
40							
41	KEWAJIBAN						
42	Kewajiban Jangka Pendek						
43	Utang Usaha						
44	Utang Pajak	Rp 1.065.714					
45	Utang Gaji/Upah dan Tunjangan						
46	Utang Utilitas						
47	Utang kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek						
48	Utang Jangka Pendek Lainnya						
49	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp 1.065.714	Rp -				
50							
51	Kewajiban Jangka Panjang						
52	Utang Ke Bank						
53	Utang kepada Pihak Ketiga Jangka Panjang	Rp -					
54	Utang Jangka Panjang Lainnya						
55	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -				
56	TOTAL KEWAJIBAN	Rp 1.065.714	Rp -				
57							
58	EKUITAS						
59	Ekuitas Akhir	Rp 218.692.571					
60	Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp 41.712.381					
61	TOTAL EKUITAS	Rp 260.404.952					
62	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 261.470.666					

Gambar 7. Proyeksi Neraca

Sementara itu, pada proyeksi laporan posisi keuangan, total aset yang dimiliki BUMDes tercatat sebesar Rp263.258.286. Aset tersebut terdiri dari kas sebagai aset lancar sebesar Rp159.115.429, nilai penyertaan modal sebesar Rp226.204.000, serta aset tetap seperti peralatan dan mesin sebesar Rp92.142.857 setelah dikurangi penyusutan. Selain itu, terdapat aset tak berwujud berupa belanja manajemen dan pelaporan senilai Rp12.000.000. Dari sisi kewajiban, BUMDes hanya memiliki utang jangka pendek berupa kewajiban pajak sebesar Rp995.714, sementara tidak ada catatan utang jangka panjang. Dengan demikian, nilai ekuitas akhir ditambah laba tahun berjalan mencapai total Rp260.404.952 dan total kewajiban ditambah ekuitas yaitu sebesar Rp261.470.666, sudah seimbang dengan sisi aset

b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang													
NO	URAIAN	TAHUN KE 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
A	PENJUALAN												
	beras	Rp -	Rp 13.000.000	Rp -	Rp -	Rp 96.571.429	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 96.571.429	Rp -	Rp -	Rp 206.142.857
	dedak	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp 7.000.000
	JUMLAH A	Rp -	Rp 14.000.000	Rp -	Rp -	Rp 99.571.429	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 99.571.429	Rp -	Rp -	Rp 213.142.857
B	HARGA POKOK PENJUALAN												
	beras	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 80.352.381	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 80.352.381	Rp -	Rp -	Rp 160.704.762
	JUMLAH B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 80.352.381	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 80.352.381	Rp -	Rp -	Rp 160.704.762
C	LABA KOTOR (A-B)	Rp -	Rp 14.000.000	Rp -	Rp -	Rp 19.219.048	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.219.048	Rp -	Rp -	Rp 52.438.095
D	BIAYA USAHA												
1	Operasional BUMDesa	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 1.040.000	Rp 9.480.000
2	Adm dan Umum	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 180.000
3	Transport												Rp -
4	Biaya Penyusutan												Rp -
5	Biaya Sewa												Rp -
6	Lain-lain												Rp -
	JUMLAH D	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 1.055.000	Rp 9.660.000
E	LABA USAHA (C-D)	Rp (55.000)	Rp 13.945.000	Rp (55.000)	Rp (1.055.000)	Rp 18.164.048	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp 18.164.048	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp 42.778.095
F	BUNGA												
G	LABA SEBELUM PAJAK (E+F)	Rp (55.000)	Rp 13.945.000	Rp (55.000)	Rp (1.055.000)	Rp 18.164.048	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp 18.164.048	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp 42.778.095
H	PAJAK	Rp -	Rp 70.000	Rp -	Rp -	Rp 497.857	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 497.857	Rp -	Rp -	Rp 1.065.714
I	LABA BERSIH (G-H)	Rp (55.000)	Rp 13.875.000	Rp (55.000)	Rp (1.055.000)	Rp 17.666.190	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp 17.666.190	Rp (1.055.000)	Rp (1.055.000)	Rp 41.712.381

Gambar 8. Proyeksi Laba Rugi

Adapun pada proyeksi laporan laba rugi menunjukkan potensi keuntungan yang menjanjikan. Total penjualan dari hasil produksi beras dan dedak diproyeksikan sebesar Rp199.142.857, dengan beban pokok penjualan mencapai Rp123.076.190. Selisih antara penjualan dan beban pokok menghasilkan laba kotor sebesar Rp76.066.667. Setelah dikurangi dengan biaya operasional dan administrasi yang berjumlah Rp9.660.000, diperoleh laba usaha sebesar Rp66.406.667. Dengan asumsi beban pajak sekitar Rp995.714, laba bersih yang dihasilkan selama periode berjalan diperkirakan sebesar Rp65.410.952. Angka ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kapasitas untuk menjalankan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Program pendampingan dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan yang dilakukan terhadap BUMDes Pasirhalang Mandiri memberikan dampak positif yang nyata dalam membantu mitra merancang perencanaan keuangan yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis data aktual. Proses pendampingan yang dijalankan melalui serangkaian wawancara, diskusi mendalam, hingga validasi dokumen, telah berhasil mengungkap kebutuhan riil mitra sekaligus menghasilkan dokumen proyeksi keuangan yang mencakup arus kas, laporan laba rugi, serta laporan posisi keuangan untuk satu tahun periode operasional ke depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha desa mampu melahirkan instrumen perencanaan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Dari hasil proyeksi tersebut, diketahui bahwa kondisi keuangan BUMDes menunjukkan kecenderungan yang sehat, baik dari segi kas operasional yang tersedia, potensi perolehan keuntungan, maupun efisiensi dalam struktur biaya yang dikeluarkan. Dokumen proyeksi ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja usaha, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat bantu penting dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, kegiatan ini juga mengidentifikasi adanya beberapa ketidaksesuaian dalam angka pada laporan posisi keuangan, khususnya dalam klasifikasi aset dan penilaian kewajiban, yang menjadi catatan penting untuk segera diperbaiki demi meningkatkan akurasi dan kredibilitas laporan ke depan.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan teknis sangat dibutuhkan oleh BUMDes sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam tata kelola keuangan yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan unit usaha desa yang profesional. Lebih jauh, kegiatan ini juga membuktikan bahwa penguatan BUMDes bukan semata-mata soal modal atau peluang usaha, tetapi juga menyangkut kesiapan manajerial dan kemampuan menyusun dokumen perencanaan keuangan yang valid, terukur, dan berkelanjutan.

Setelah menjalani proses pendampingan selama satu bulan, tim menyimpulkan bahwa membangun usaha desa yang sehat membutuhkan persiapan yang matang, terutama dalam aspek manajemen operasional dan sistem pelaporan keuangan. Salah satu pembelajaran utama dari program ini adalah bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang aplikatif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan program dan mendorong kemandirian kelembagaan, disarankan adanya program pelatihan berkala, pendampingan lanjutan dari institusi pendidikan tinggi atau pemerintah daerah, serta penyusunan panduan teknis pengelolaan keuangan yang praktis dan mudah diimplementasikan secara mandiri oleh pengurus BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakam, L. I. (2023). Analisis bibliometrik perkembangan penelitian kewirausahaan pada ekonomi digital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 4(2), Article 53182. <https://doi.org/10.17509/jpei.v4i2.53182>
- Hakam, L. I., Ahman, E., Disman, D., Mulyadi, H., & Hakam, D. F. (2023). Exploring trends in innovation within digital economy research: A scientometric analysis. *Economies*, 11(11), Article 269. <https://doi.org/10.3390/economies11110269>
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. W. (2020). Accountability in governance: will and can traditional village-owned enterprises achieve it? *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2165>
- Harto, P. P., & Riwandari, R. (2018). Tinjauan teoritis laporan keuangan BUMDes berbasis syariah. *JAKIS: Jurnal Akuntansi Islam*, 6(2), <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4>

- Harto, P. P., & Riwandari, R. (2018). Tinjauan teoritis laporan keuangan BUMDes berbasis syariah. *JAKIS: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4>
- Iriani, N. I., Nugroho, A. P., & Tia, M. Y. (2020). Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meningkat kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Referensi: Ilmu Manajemen & Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.33366/ref.v10i1.3543>
- Marlinda, & Sudarma, A. (2023). Analisis pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasiripis. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 4(2), <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v4i2.4853>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Subagyo Desa Miagan – Jombang. *Comvice?: Journal of Community Service*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124>
- Priatna, I. A., Hakim, D. B., Syaukat, Y., & Effendi, J. (2023). Reviewing the role of BUMDes in Bogor Regency in increasing revenue. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 39(1), <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i1.2227>
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat kesadaran kepatuhan pajak: studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Rahmawati, M., Murni Nia, & Hasniah (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sinaulu Jaya. *JOPSPE*, 8(2). <https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.82>
- Ratmasari, D. I., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2021). Kualitas laporan keuangan BUMDes dan faktor yang mempengaruhinya. *Borobudur Accounting Review*, 1(1), <https://doi.org/10.31603/bacr.4892>
- Risnawati, Kusuma, I. L., & Kristiyanti, L. (2022). The effect of regional financial management, financial accounting systems and internal control systems on regional government performance (case study: Boyolali Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1260–1269. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6279>
- Sawitri, A. P., Afkar, T., Suhardiyah, M., & Suharyanto. (2020). Penguatan pengelolaan keuangan BUMDes sebagai upaya menuju desa mandiri di Desa Kebontunggul Mojokerto. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 470–476. <https://doi.org/10.21067/jpm.v5i2.4324>
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>

- Tarlani, T., Saraswati, S., Akliyyah, L. S., L. F. R., & Dananjaya, H. A. S. (2023). Indikator tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam merespon era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(3), 422–434. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.41081>
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan keuangan BUMDes: Upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 130–141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>